



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN DINAS OLEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

UMI FARIDHATUL DA'WA

NIM. 11727200348

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2021 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah”**, yang ditulis oleh:

Nama : UMI FARIDHATUL DA'WA

NIM : 11727200348

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021
Pembimbing Skripsi


Lysa Angrayni, SH, MH
NIP.197901312006042003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN DINAS OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.” yang ditulis oleh :

Nama : **UMI FARIDHATUL DA'WA**

Nim : 11727200348

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Zulkifli. M.Ag.

Sekretaris

Dr. Kasmidin, Lc., MA

Penguji I

Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II

Dr. H. Magfiroh, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 19731006 200501 1 005



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umi Faridhatul da'wa.
NIM : 11727200348
Tempat/Tgl. Lahir : Rkl. Kerinci , 19 Februari 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan hukum
Prodi : Ilmu hukum
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan dinas oleh badan
Pengelolaan Keuangan dan aset daerah pada dinas
Pekerjaan Umum Berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan prosedur
Pengelolaan Barang milik daerah .

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 - 12 - 2021

Saya yang membuat pernyataan



Umi Faridhatul da'wa.

NIM : 11727200348

*~~gigit~~ salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Umi Faridhatul Da'wa : Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengawasan ini bertujuan agar fasilitas kendaraan dinas pada dinas Pekerjaan Umum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan yakni demi keperluan perkantoran dan operasional kedinasan dan bukan disalahgunakan untuk keperluan pribadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap kendaraan dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan apa kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawa. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 158 responden, Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 responden dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan oleh BPKAD terhadap penggunaan kendaraan dinas pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) belum terlaksana secara baik dan maksimal. Kendala yang dialami oleh BPKAD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas Pekerjaan Umum adalah kurangnya koordinasi antara pihak terkait, kinerja aparatur pada Dinas PU yang kurang baik dan rendahnya sumber daya aparatur di BPKAD.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah , segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tak lupa pula dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau yang telah mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak , baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Kepada Ayahanda M.Sajadi dan Ibunda Erni Dawati, tercinta yang telah memeberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang serta ridhonya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan dalam untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis dan juga telah bersusah payah untuk membiayai serta memberikan dorongan moril dan materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
2. Kepada abang dan adik kandung penulis Imam Busyairi Amrullah, Miftakhul Rozak Afif, dan Fatkhur Rohman Habibullah yang telah memberikan seluruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- dukungan, cinta dan kasih sayangnya serta ketulusan dalam doa dan mengikhlaskan pengorbanan yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku rektor UIN SUSKA Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH., MH dan sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Lysa Angrayni, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH, MH sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
9. Ibu Martha Hasanah, S.H., MH. Yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian perkuliahan.
10. Kepada sahabat penulis Meytri Adinda Rahmatsyah, Nadya Afrila Yolani, Misi Zuliya Yuningsih, Lady Gita novriantri, Nola Arulia Angriani, yang telah menemani, membantu dan memotivasi dalam pembuatan hingga menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Yazid Taufikurrahman, dan Aprilia Dwidhasmarani yang telah menemani, membantu dan sebagai tempat berkeluh kesah penulis selama menyelsaikan skripsi ini.

12. Teman seperjuangan kelas IH F angkatan 2017 dan teman angkatan Ilmu Hukum 2017 yang telah memotivasi penulis

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan . Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

UMI FARIDHATUL DA'WA
NIM. 11727200348



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Pelalawan.....	19
1. Sejarah BPKAD	19
2. Visi dan Misi.....	21
3. Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan	22
B. Gambaran Umum Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan	24
1. Sejarah.....	24
2. Visi dan Misi	26
3. Struktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan...	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengawasan	28
B. Tinjauan Tentang Aset Daerah	34
C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Dinas	38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap kendaraan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah..... 52
- B. Kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas Pekerjaan Umum (PU) 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	14
-------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas BPKAD	22
Gambar II. 2	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (PU....	27





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai organisasi kelompok pergaulan hidup manusia memiliki pimpinan negara yang terdiri dari pemimpin dan anggota-anggotanya. Pemimpin negara lazim disebut kepala negara. Sementara itu, anggota-anggotanya dinamakan alat-alat perlengkapan negara yang lazimnya disebut pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.¹ Pembentukan struktur organisasi pemerintah dipengaruhi oleh kebutuhan untuk melaksanakan fungsi negara oleh pemerintahan yang diwujudkan dalam pembagian atau distribusi kekuasaan pemerintah yang diikuti dengan dilaksanakannya pembentukan struktur organisasi pemerintahan (pusat dan daerah) untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah tersebut.²

Dalam negara Indonesia pemerintahan pusat mempunyai wewenang mengurus organisasi negaranya, yaitu mengatur pembagian tugas secara horizontal dan vertikal di daerah-daerah dalam wilayah negara itu serta berwenang mengadakan hubungan dengan negara lain.³

Salah satu lembaga pemerintah daerah yang juga bewenang dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah ialah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD. Kedudukan

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta ,PT.RajaGrafindo Persada, 1984), hlm 93.

² W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Sinar Grafika Offset, 2018), hlm 105.

³ R. Abdoel Djamali, op. cit. hlm 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BPKAD adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya BPKAD mempunyai beberapa fungsi pokok yaitu, Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah, Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Pelaksanaan administrasi Badan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang.⁴

Kabupaten Pelalawan, yaitu sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau memiliki luas wilayah 13.924,94 Km, jumlah penduduk sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 kk yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya dan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan.⁵ Juga memiliki BPKAD yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang sama dengan daerah lain yaitu selaku pejabat pengola barang milik daerah, Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran

⁴ <https://bpkad.pelalawankab.go.id/main>

⁵ <https://www.riau.go.id/home/content/21/kab-pelalawan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendapatan Dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tugas pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat perlu adanya kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang diperoleh dari dana daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. Barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dikelola secara tertib dan benar serta diguna secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 dinyatakan, bahwa: “kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran”.

Dalam Pasal 59 ayat (1) dinyatakan, bahwa: “kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) dapat disediakan dan dipergunakan bagi pimpinan DPRD dan pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.”

Dalam pasal 92 ayat (2) poin a dinyatakan bahwa: pengamanan terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara pemanfaatan sesuai tujuan, penggudangan / penyimpanan baik tertutup maupun terbuka, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemasangan tanda kepemilikan / label yang dilakukan oleh pengguna barang dengan koordinasi BPKAD.

Dalam islam juga telah diatur tentang kewajiban kita untuk dapat memaksimalkan manfaat wewenang yang telah didapat dengan sebaik-baiknya, baik secara konsumsi dan investasi harus dilakukan secara efisien, dalam hal ini Islam telah menggariskan larangan terhadap tindakan tabzir dan israf , sebagaimana tersurat dalam surat al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”* (QS. Al-Maidah (5): 87).

Untuk melindungi aset daerahnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus melakukan pengawasan agar aset daerah dapat digunakan sebagai mana mestinya dan terhindar dari penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. Dalam pasal 184 Peraturan Bupati ini telah dijelaskan mengenai prosedur dalam pengawasan aset daerah, yaitu :

1. Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultana Syarif Kasim Riau

2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
3. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa, kendaraan dinas merupakan aset daerah yang disediakan pemerintah bagi pegawai dinas untuk kegiatan operasional perkantoran dan harus dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan, itu artinya kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Namun kenyataan yang terjadi adalah masih banyak kendaraan dinas tersebut yang penggunaannya bukan untuk hal-hal yang bersifat kedinasan, melainkan hal-hal yang bersifat pribadi. Ini dibuktikan dengan masih beroperasinya kendaraan dinas di luar jam kerja. Dengan adanya kendaraan dinas di tempat-tempat parkir di pasar pada hari libur atau di tempat parkir di kafe pada malam hari serta kendaraan dinas digunakan untuk mudik pada hari-hari libur nasional ⁷, hal ini telah dijelaskan pula oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) secara resmi yang telah melarang fasilitas mobil dinas untuk keperluan mudik, meskipun mobil dinas termasuk fasilitas yang melekat pada pejabat, namun penggunaannya di luar untuk

⁶ Peraturan Bupati Pelalawan, Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁷ Nuzlan botutihe, "Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo". Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 6 Nomor 2 Tahun 2018, hlm 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepentingan kedinasan tetap tidak bisa dibenarkan,⁸ Serta ada pula beberapa dari pegawai yang sudah tidak bekerja lagi masih menggunakan fasilitas kendaraan dinas tersebut. Penyalahgunaan aset daerah pada kendaraan dinas seperti ini akan mengakibatkan pemborosan dan menimbulkan kerugian bagi daerah serta siapa pun yang melaukannya akan dikenai tuntutan ganti rugi.

Dalam Pasal 186 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 dinyatakan, bahwa:

1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam islam mengumpulkan kekayaan diperbolehkan atau menahan diri dari mengumpulkan itu, yang juga diperbolehkan. Al-Shaybani mengatakan bahwa bagi mereka yang ingin mengontrol keinginan yang berlebihan, itu sudah cukup bagi mereka untuk membatasi tujuan dari pendapatan mereka ke tingkat kedua. Dia mengutip ayat al-Quran untuk mendukung pandangannya:

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ يُسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۖ

⁸ Misi S.Salunga, "Penggunaan Asset Negara / Daerah Secara Pribadi Di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan ". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion . Vol 3 Tahun 2015

⁹ Peraturan Bupati Pelalawan, Op. Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).”* (QS. An-Nazi,,at (79): 41-42)¹⁰

Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawai Negri, pegawai perusahaan daerah dan pegawai daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindakan pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tercantum dalam pasal (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹¹

¹⁰ Ihdi Karim Makinara, “Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial”. jurnal media syariah . Vol. 19, No. 2, 2017

¹¹ Penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, khususnya dinas pekerjaan umum telah memberikan sebanyak 60 unit kendaraan mobil dan motor kepada pegawainya, beberapa diantaranya telah didapati menyalahgunakan penggunaan kendaraan dinas, seperti sepeda motor dengan nomor BM 2063 C yang dipegang oleh Kepala Upt-Spam Langgam yang ditemui membawa pulang kendaraan dinas yang diperolehnya dan menggunakannya diluar jam kantor untuk kepentingan pribadinya, sama halnya dengan pic up BM 8076 C yang dikuasai oleh Kepala Bidang Bina Marga yang juga didapati membawa pulang kendaraan dinas dan ditemui sedang berada ditempat wisata pada hari libur nasional. Serta mobil pic up Marafles yang masih dikuasai oleh Pegawai PU berinisial ZWN selaku mantan Pegawai PU dalam Bidang Bina Marga BM 8014 CF didapati kendaraan dinas tersebut masih berada ditangannya dan belum dilakukan proses pemindahtanganan ataupun dikembalikan kepada pihak kedinasan.¹²

Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya.¹³ Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan dengan memperhatikan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah , serta berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang

¹² Zefrizal, UPTD Spam Air Minum dan Kepala Bidang Aset Kedinasan Badan Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Pelalawan , Wawancara, tanggal 6 Januari 2021

¹³ Dr.Ni'matul Huda, *ilmu negara*, (Yogyakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur dan diawasi oleh pihak terkait yang dalam penelitian ini meninjau dari peran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.

Berkenaan dengan permasalahan ini, BPKAD selaku pejabat Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan tentunya harus pro aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, namun dalam kenyataannya BPKAD selaku pejabat Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan belum menunjukkan ketegasan dalam menjaga dan mengawasi aset daerah yang dipergunakan oleh kedinasan khususnya dalam penelitian ini yaitu dinas PU (Pekerjaan Umum).

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan ini, dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup ini terhadap pelaksanaan pengawasan kendaraan dinas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan Kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan Aset Daerah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas pekerjaan umum daerah Kabupaten Pelalawan .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) terhadap kendaraan dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah ?
2. Apa kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan oleh Badan Pengelolaaan Keuangan Aset Daerah Terhadap Kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Dapat mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Dapat mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Manfaat praktis

1. Dapat memberikan data dan informasi bagi pihak – pihak terkait terhadap pelaksanaan pengawasan kendaraan dinas oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Serta

mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.¹⁴ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁵ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

¹⁴ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Andi, 2017), hlm. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta, UII Press, 1982), hlm. 51.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPKAD) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang berkedudukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Riau. .

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kedinasan BPKAD Kabupaten Pelalawan.
- b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.¹⁸ Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah terhadap kendaraan dinas pegawai Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas BPKAD dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum.

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.²⁰

¹⁷ Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 46.

¹⁸ Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru, Anafah Publishing, 2011), hlm. 46.

¹⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

²⁰ Jurnal Analisis, *Desember 2017*, Vol.6 No 2, hlm 188-193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pegawai Dinas BPKAD	88	3	4%
2	Pegawai Dinas PU	70	7	10%
JUMLAH		158	10	7%

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat, melalui penelitian²¹ Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²² Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2009), hlm. 12.

²² *Ibid*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Barang Milik Daerah.
- c. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulam Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda – benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.²³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.

b. Wawancara

yaitu peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di teliti guna melengkapi data yang diperlukan.²⁴

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²⁵ Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

²³ M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Ar-Ru Media, 2012), hlm. 165.

²⁴ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabet, 2014), hlm. 127.

²⁵ *Ibid*, hlm. 127.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok bahasan, dan dari masing-masing pokok bahasan akan dibagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Kedinasan BPKAD dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Riau sebagai lokasi penelitian.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan teori – teori sebagai dasar hukum yang digunakan dan konsep – konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian – penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. dan kendala yang dialami BPKAD dalam menjalankan tugasnya mengawasi pengguna kendaraan dinas pekerjaan umum Kabupaten Pelalawan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah BPKAD

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah, beralamat di Jl. Sultan Syarif Harun, Hasyim, Kecamatan. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Dinas BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Pelalawan dibidang keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang kepala badan melalui sekretariat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati. Mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwasanya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah memiliki kewajiban meliputi :

- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
- c. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

BPKAD Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dalam perjalanannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

2. Visi dan Misi

Visi

- Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)

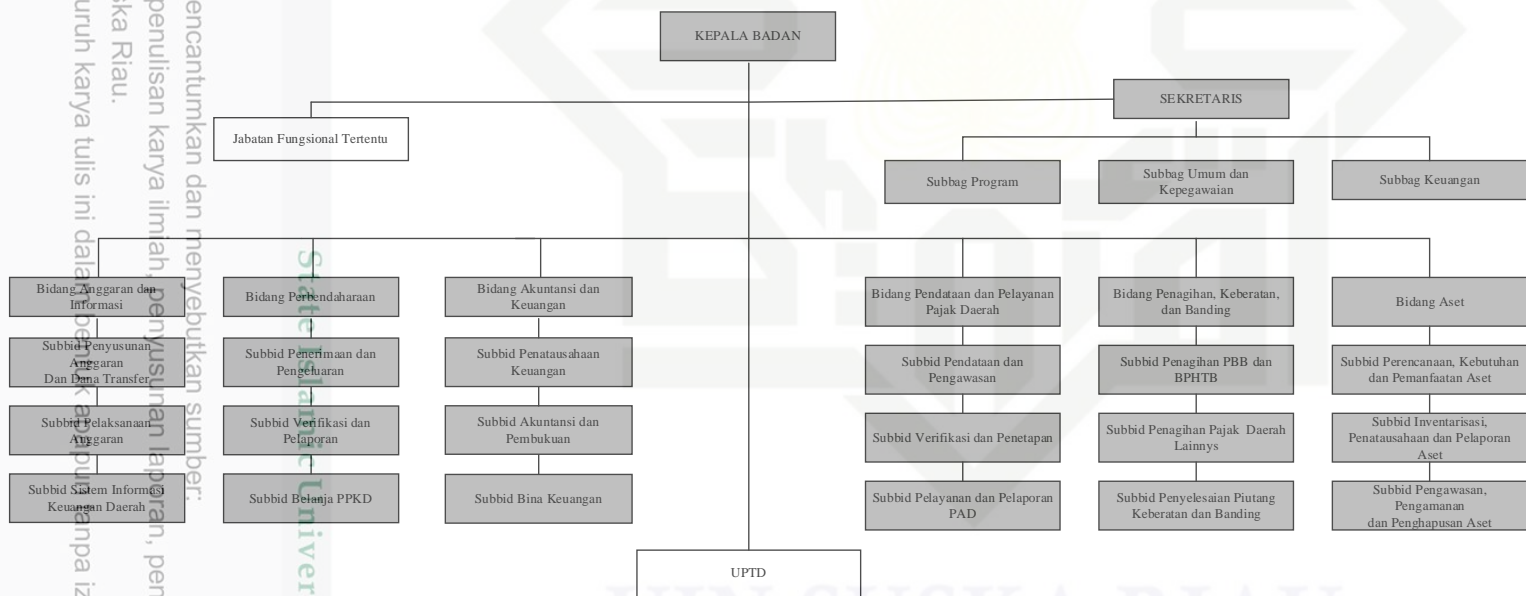
Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.

5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.
6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang berkelanjutan.
7. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan pencapaian misi

3. Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

Gambar II. 1
Bagan Susunan Organisasi Dinas BPKAD



Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, dapat dijelaskan susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Badan membawahi Sekretaris dan 6 (enam) bidang, yaitu :

- a. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.
 1. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan dana Transfer
 3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah
- c. Bidang Perbendaharaan.
 1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan
 3. Sub Bidang Belanja PPKD
- d. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan.
 1. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan
 3. Sub Bidang Bina Keuangan
- e. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pengawasan
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
 3. Sub Bidang Pelayanan dan Pelaporan PAD
- f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding
 1. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya
3. Sub Bidang Penyelesaian Piutang Keberatan dan Banding
- g. Bidang Aset.
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset
 2. Sub Bidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset
 3. Sub Bidang Pengawasan, Pengamanan dan Penghapusan Aset²⁶

B. Gambaran Umum Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah

Dinas PU Kabupaten Pelalawan merupakan kantor dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk wilayah Kabupaten Pelalawan, provinsi Riau. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Pelalawan, Riau yang berlokasi di Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci Barat, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Terkait dengan wewenang tersebut, maka melalui kantor ini beberapa surat perizinan diproses. Beberapa surat tersebut seperti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui kedinasan ini pula urusan pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintah dilakukan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan

²⁶ <https://bpkad.pelalawankab.go.id/main>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumahan Rakyat : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi.
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah.
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Visi dan Misi

Visi

“Inovasi Menuju Pelalawan Emas” (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.
6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan.
7. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan.²⁷

²⁷ <https://www.dpuprpelalawan.com/bidang/sekretariat>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak seluruh atau sebagian dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dan lebih dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam pokok pembahasan manajemen, pengawasan menjadi satu rangkaian dalam proses seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang bertujuan untuk menjamin kesuksesan suatu kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan..²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan diartikan sebagai suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Sedangkan Lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan..²⁹

Menurut UUD 1945, Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsekuensi dari negara kesejahteraan tersebut ialah negara ikut campur dalam segala bentuk aktivitas masyarakat untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sangat terlibat dalam urusan kegiatan masyarakat. Ikut campur yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut harus diawasi agar tidak

²⁸ Muchsan, S.H., *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta, liberty, 1992) hlm 36

²⁹ Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Jakarta, penerbit intermedia, 1986) hlm 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi suatu tindakan melanggar hukum dan merugikan bagi masyarakat dan negara.³⁰

Tujuan dilakukannya pengawasan ialah :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, yaitu :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.³¹

Pelaku pengawasan terdiri dari berbagai unsur yaotu dapat berwujud dan tidak berwujud seperti manusia, sistem, dan sebagainya. Unsur-unsur pengawasan yaitu :

1. Tuhan sebagai penguasa alam semesta, di manifestasikan dalam berbagai aturan agama dan keyakinan terhadap kekuasaannya.

³⁰ Muchsan, ibid., hlm 8.

³¹ Said Muhammad Rizal, "Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai". *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* . Vol Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manusia sebagai pribadi atasan, bawahan serta komponen yang menyertai sifat manusia itu sendiri termasuk etika, moral keyakinan, budaya, sifat dan sebagainya.
3. Sistem selaku tata cara yang dibuat manusia untuk menjaga agar tujuan tercapainya, misalnya penggunaan kartu, password, birokrasi, peraturan dan sebagainya.
4. Lingkungan masyarakat, baik social, budaya, pemerintahan, adat, hukum, kebiasaan.
5. Organisasi atau unit organisasi yang bertanggung jawab pada fungsi pengawasan.
6. Gabungan dari masing-masing unsur.³²

Besarnya campur tangan pemerintah dalam urusan negara ini dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan tercela yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk perbuatan tersebut antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif seseorang atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Sedangkan dalam arti luas adalah perbuatan yang melanggar suatu hak orang lain, melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut, melanggar kesusilaan dan melanggar kepatutan/kepentingan yang berlaku dalam masyarakat terhadap orang atau barang.

³² Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta, penerbit Cv Budi Utama, 2018) hlm 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perbuatan melawan undang-undang

Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang, bila pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum tidak berdasarkan undang-undang maka dapat dikategorikan suatu perbuatan yang illegal. Beberapa contoh perbuatan melawan undang-undang adalah:

- a. Seorang pejabat mengambil keputusan sendiri, padahal ketentuan undang-undang dia diwajibkan meminta persetujuan instansi pemerintah lain dan memberitahukan persoalan tersebut kepadanya.
- b. Pejabat polisi lalu lintas memarkir atau menjalankan kendaraan dengan melanggar undang-undang.
- c. Pejabat yang menggunakan kendaraan sitaan yang perkaranya belum diputuskan oleh hakim.baik digunakan untuk keperluan dinas maupun non dinas.

3. Perbuatan yang tidak tepat

Perbuatan yang tidak tepat adalah perbuatan yang dilakukan dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tidak sesuai dengan tujuan perbuatan tersebut. Untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan tidak tepat harus dilihat dari dasar menimbang dan dasar mengingat dari suatu peraturan yang dikaitkan dengan perbuatan yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perbuatan tidak bermanfaat

Untuk membentuk suatu pemerintahan yang efisien, setiap tindakan pemerintah harus memiliki manfaat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini manfaat yang diterima oleh masyarakat harus tepat sasaran. Segala perbuatan pemerintah apabila tidak memiliki manfaat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka disebut dengan perbuatan tidak bermanfaat.

e. Perbuatan menyalahgunakan wewenang

Perbuatan menyalahgunakan wewenang merupakan perbuatan yang paling sering di temukan dalam negara yang memberikan kebebasan kepada pejabat negara untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum walaupun belum ada atau tidak ada peraturan yang mengaturnya demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pejabat pemerintah diberi kewenangan yang cukup luas sehingga sangat rawan dilakukan penyalahgunaan wewenang. Definisi perbuatan menyalahgunakan wewenang sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk tujuan umum tertentu akan tetapi malah digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Menurut Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

telah ditentukan sebelumnya.³³ Menurut George R.Terry pengawasan ialah sesuatu yang dilakukan dengan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan beberapa unsur berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut secara administrative maupun yuridis.³⁴

³³ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta, ghalia Indonesia 1986) hlm. 19

³⁴ *Ibid*, hlm 37-38

B. Tinjauan Tentang Aset Daerah

Aset berasal dari Bahasa Inggris “asset” dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.

Aset daerah atau disebut juga BMD (barang milik daerah) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau pun diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut aset yang dimiliki oleh setiap daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menjaga aset daerah dengan sebaik-baiknya agar aset daerah selalu berada dalam keadaan baik dan dapat digunakan.

Aset daerah sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :

1. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada perangkat daerah (PD) / instansi/ lembaga pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Barang yang dimiliki oleh perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaranannya dibebankan pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya.³⁵

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat (5) “pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah kepala daerah”, dalam ayat (11) dijelaskan bahwa “pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah”, ayat 16 “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh dari beban APBN.
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti:
 1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.
 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
 3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

³⁵ Peraturan Bupati Pelalawan, Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

³⁶ Moch.Ardi, “kajian hukum terhadap penggunaan kendaraan dinas diluar keperluan dinas”. *Jurnal UNIBA law review* . Vol 1 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya aset dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan utama yaitu sebaga berikut :

1. Konvertibilitas (convertibility)

Kovertibilitas adalah kemudahan suatu aset untuk dapat ditukar menjadi uang tunai , terbagi menjadi 2 .

a. Aset lancar (Aktiva lancar)

Yaitu , aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas (uang tunai) dan setara kas (biasanya dalam satu tahun), seperti Kas, Surat-surat berharga (saham,obligasi), Piutang dagang, Perlengkapan kantor, Persediaan barang dagang, Deposito jangka pendek.

b. Aset tidak lancar (Ativa tidak lancar)

Yaitu, aset yang tidak mudah dan mudah dikonversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar disebut juga aset tetap, aset jangka Panjang atau aset keras. Contoh aset tidak lancar atau tetap meliputi, tanah, bangunan, mesin, peralatan, paten, merek dagang.

2. Keberadaan fisik (physical existence)

Berdasarkan keberadaan fisik, aset dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu tangible assets (aset berwujud) dan intangible assets (aset tidak berwujud).

a. Aset berwujud (Tangible Assets)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu, aset yang memiliki keberadaan fisik /dapat disentuh, dirasakan dan diilhami, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, kas, peralatan kantor, persediaan barang dagang, surat berharga (saham, obligasi).

b. Aset tak berwujud (intangible assets)

Yaitu, aset yang tidak memiliki keberadaan fisik, seperti :

Good will (nilai lebih yang dimiliki perusahaan dikarenakan keistimewaan tertentu) yakni, hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, izin, kekayaan intelektual perusahaan.

3. Penggunaannya (usage)

Aset atau aktiva dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaan operasionalnya, aset diklasifikasikan sebagai aset operasi atau aset non-operasional.

a. Aset operasi (operational assets)

Aset operasional adalah aset yang diperlukan dalam operasi bisnis sehari-hari. Dengan kata lain, aset operasi digunakan untuk menghasilkan pendapatan. yaitu, kas, persediaan, bangunan, mesin, peralatan, hak paten, hak cipta, Goodwill.

b. Aset non- operasi (assets non-operational)

Aset non-operasional adalah aset yang tidak diperlukan untuk operasi bisnis sehari-hari tetapi masih dapat menghasilkan

pendapatan. Yaitu, investasi jangka pendek, surat berharga, tanah kosong, penghasilan bunga dari deposito tetap³⁷

C. Tinjauan Umum tentang Kendaraan Dinas

Setiap pegawai negeri sipil dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah hal disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu setiap pengguna fasilitas kendaraan dinas, pegawai negeri sipil daerah harus memperhatikan resiko yang akan ditanggung bila di dapati sedang melakukan penyalahgunaan terhadap Fasilitas aset.³⁸

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.3 Tahun 2012 mengartikan kendaraan dinas sebagai kendaraan bermotor yang terdaftar dalam sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara yang digunakan oleh pejabat negara.³⁹

Beberapa pengertian kendaraan dinas antara lain, menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia No 1 Tahun 2013 Pasal 1 Angka (3), mengartikan kendaraan dinas sebagai semua jenis kendaraan bermotor yang

³⁷ Sri wahyuni dan rifki khoirudin, *pengantar manajemen aset* , (makassar, cv.nas media pustaka, 2020) hlm 12-15

³⁸ Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

³⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas. Pasal 1 angka 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.⁴⁰

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 menyatakan bahwa barang milik negara/daerah merupakan semua barang yang dibeli atas beban APBN/BMD atau dari perolehan lain yang sah, barang milik negara/daerah yang selanjutnya disebut BMN/BMD terbagi menjadi 2 jenis , yaitu BMN/BMD berupa tanah dan bangunan, serta BMN/BMD selain tanah dan bangunan termasuk kendaraan dinas.⁴¹

Kendaraan dinas merupakan merupakan barang milik negara, yakni barang yang dibeli atau diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/ lapangan.⁴²

Kendaraan dinas dalam Peraturan Menteri Keuangan 76 Tahun 2015 disebut dengan istilah alat angkut darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri yakni kendaraan yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.⁴³

⁴⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Pasal 1 angka 3

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka (1)

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Pasal 1 huruf g.

⁴³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Pasal 1 angka 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan dinas terdiri dari 2 jenis kendaraan yakni, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang diberikan kepada pejabat karena menduduki suatu jabatan tertentu, sedangkan kendaraan dinas operasional merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh staf atau supir dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan operasional lapangan.

Maka dapat disimpulkan kendaraan dinas merupakan seluruh kendaraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah baik pusat/daerah, BUMN/BUMD yang termasuk dalam kategori BMN/BMD bukan tanah ataupun bangunan yang memiliki ciri berplat merah dengan tulisan putih dan plat hitam dengan tulisan putih yang memiliki kode huruf pembeda dengan kendaraan pribadi.

Pemberian fasilitas kendaraan dinas harusnya menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi para pejabat negara yang menerimanya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Pemberian fasilitas kendaraan dinas merupakan sebuah bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah daerah setempat, dan juga sebagai wujud dari komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah setempat dalam memberikan perhatian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pejabat negara.⁴⁴

a. Landasan Hukum Penggunaan Kendaraan Dinas

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada otonomi daerah diberikan kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat, sehingga

⁴⁴<https://kalsel.antaranews.com/berita/5410/kendaraan-dinas-harus-sesuai-fungsi/diakses> tanggal 13 April 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu dilakukan upaya penyempurnaan terhadap ketentuan yang dibawahnya termasuk pengelolaan barang milik daerah.⁴⁵ Menurut Lukman Hakim kehendak dalam menyelenggarakan otonomi daerah ialah pemberian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, pemberian urusan dengan kewenangan tersebut diatur secara proporsional, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional bagi daerah, pelaksanaan otonomi daerah dimaksud dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.⁴⁶

Dalam melaksanakan pengadaan kendaraan dinas ini pemerintah telah membuat kebijakan dalam mengambil keputusan, berikut landasan hukum penggunaan kendaraan dinas pada Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

⁴⁵ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik ,Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung, Alfabetha, 2005) hlm 44

⁴⁶ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah* (Malang, Setara Press, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaaan Barang Milik Daerah.

b. Tujuan dan Fungsi Pemberian Kendaraan Dinas

Pemerintah yang baik ialah pemerintah yang dapat melayani masyarakat secara optimal. Dalam melaksanakan tugas pelayanaannya terhadap masyarakat aset merupakan komponen penting untuk menunjang ke kegiatan operasional perkantoran. Aset dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin dan lainnya yang telah di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Kendaraan dinas yang dipergunakan oleh kepala dinas dan bagian yang ada di satuan kerja perangkat daerah di peruntukan untuk menunjang kinerja pejabat negara dalam melaksanakan tugas. Pedoman peraturan pengelolaan kendaraan dinas diatur dalam masing-masing peraturan daerah pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang fasilitas kendaraan dinas ialah sebagai berikut :

1. Ketua DPRD diberiksn 1 unit kendaraan jenis jip atau minibus dengan kapasitas 2.500 cc
2. Wakil ketua DPRD diberikan masing-masing 1 unit kendaraan jenis jip atau minibus dengan kapasitas 2.200 cc
3. Pejabat eselon II diberikan masing-masing 1 unit kendaraan dengan kapasitas 2000 cc
4. Pejabat eselon III diberikan masing-masing 1 unit kendaraan dengan kapasitas 1.600 cc
5. Pejabat eselon IV diberikan masing-masing kendaraan roda 2 / sepeda motor dengan kapasitas 200 cc⁴⁷

Tujuan dari pemberian fasilitas kendaraan dinas yaitu agar tercapainya kelancaran dalam menjalankan operasional tugas yang di emban oleh dinas/kantor/bagian di lingkungan pemerintah. Pengadaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.⁴⁸

Penyediaan kendaraan dinas dimaksud sebagai alat bantu untuk kelancaran pelaksanaan tugas para pejabat negara agar meningkatkan

⁴⁷ Peraturan Bupati Pelalawan, Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 61

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten pelalawan Nomor 3 tahun 2011 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.⁴⁹

c. Pengawasan Kendaraan Dinas

Pengawasan merupakan hal yang terpenting agar tercapainya maksud dan tujuan dalam suatu kegiatan organisasi atau negara. Berikut beberapa macam klasifikasi bentuk-bentuk pengawasan ,yaitu :

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek, sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menerima dan mempelajari laporan-laporan yang di dapat dari pelaksana baik lisan maupun tertulis serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan.

2. Pengawasan represif dan pengawasan preventif

a. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat , meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya melalui post audit.

⁴⁹ Lia Daniati dan Lena Farida, *Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 1, Nomor 3, tahun 2013, hlm 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaa dan sumber-sumber lain secara preaudit.

3. Pengawasan ekstern dan pengawasan intern

a. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar pemerintahan .

b. Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari dalam pemerintahan .⁵⁰

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah dalam menjalankan tugas nya bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.⁵¹

⁵⁰ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hlm. 21.

⁵¹ Peraturan Pemerintah No. 79 Tahunm 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan kendaraan dinas secara pribadi diluar keperluan dinas merupakan pelanggaran terhadap peraturan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara karena tidak sesuai dengan peruntukannya karena dinggap menguntungkan dan memperkaya pribadi melalui penyelenggaraan dan fasilitas negara. Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam penyalahgunaan kendaraan dinas ini merupakan perbuatan yang tidak patut dan dapat dianggap telah menggunakan uang rakyat untuk keperluan pribadi, seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 secara jelas disebutkan bahwa barang milik negara dapat di sewa pakaikan melalui surat perjanjian dengan biaya yang timbul dari penggunaan yang di bebaskan ke pada pihak yang mendapatkan manfaat dari sewa pakai tersebut. Artinya penggunaan kendaraan dinas bukan untuk keperluan dinas dalam asumsi disewa pakai , yang menggunakan anggaran negara dalam pemeliharaan, perbaikan dan biaya lain yang muncul seperti pajak dan lain-lain merupakan pemborosan anggaran negara. Dan biaya tersebut diperoleh dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Bahkan dalam pembelian bahan bakar, biaya pemeliharaan dan perbaikannya jika rusak dan pembayaran pajaknya menggunakan uang yang dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat.

Dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 184 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah ,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap kendaraan dinas sebagai aset daerah., yaitu :

1. Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
3. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

kendaraan dinas merupakan salah satu benda yang termasuk dalam barang milik Negara yang tergolong ke dalam fasilitas negara jenis peralatan dan mesin. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Peorangan Dinas. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan terkait penggunaan kendaraan dinas di

⁵² Peraturan Bupati Pelalawan, Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi pemerintahan sebenarnya diatur dalam peraturan menteri dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah baik itu berupa peraturan gubernur atau peraturan daerah. Pengawasan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah dilakukan dengan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Selain itu ada juga Pengawasan Intern Dan Pengawasan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam dinas-dinas itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi atau dinas itu sendiri ataupun juga oleh masyarakat.⁵³

d. Sanksi Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Meskipun telah ada peraturan tentang penggunaan kendaraan dinas tetap saja pelanggaran terus terjadi sampai saat ini, banyaknya kendaraan dinas tersebut digunakan bukan untuk kepentingan kedinasan melainkan untuk kepentingan pribadi. Ini dibuktikan dengan masih beroperasinya kendaraan dinas diluar jam kerja. Dengan adanya kendaraan dinas ditempat-tempat parkir dipasar pada hari libur dan ditempat parkir di kafe-kafe pada malam hari. Serta tidak jarang juga ditemui dihalaman losmen tempat karaoke dan beberapa tempat lain yang kurang “bermartabat”. Meskipun persentasenya relative kecil dan terlepas dari apakah fasilitas negara tersebut sedang dimanfaatkan untuk urusan kedinasan atau bukan tentu ini bisa menumbuhkan pikiran buruk yang dapat menjatuhkan

⁵³ Ida Ayu Widiati, “Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Instansi Pemerintah”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1 Nomor 2 Tahun 2020, hlm 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan masyarakat terhadap integritas moral para penyelenggara negara.⁵⁴

Dalam upaya pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas agar pengguna barang dapat menggunakan kendaraan dinas sebagai mana mestinya dan penuh tanggung jawab, maka dalam penyerahan kendaraan dinas akan dilakukan BAST yaitu penerima barang harus membuat Berita Acara Serah Terima yang berisi kan antara lain :

1. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain nomor polisi merek,tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan dinas tersebut.
2. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut.
3. Pernyataan untuk mengembalikan kendraan dinas setelah berakhir jangka waktu pengguna atau masa jabatan berakhir pada pengguna barang.
4. Pengembalian dilakukan pada saat berakhir masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan dinas.⁵⁵

Setiap kerugian yang diakibatkan karna kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengeloan barang milik daerah maka akan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan

⁵⁴[https://www.kaskus.co.id/thread/51d26a3359cb17b432000000/penyalahgunaan-kendaraan-plat-dinas-negara/diakses tanggal 1 Juli 2018](https://www.kaskus.co.id/thread/51d26a3359cb17b432000000/penyalahgunaan-kendaraan-plat-dinas-negara/diakses%20tanggal%201%20Juli%202018)

⁵⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,pasal 305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangan. sanksi dapat berupa sanksi administrative dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan. Setiap orang yang memanfaatkan/ menguasai barang milik daerah tanpa dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang sah akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengurus dan pengelola barang , dapat diterapkan sanksi dan praturan daerah pada pejabat/pegawai yang melanggar berita acara pemberian penggunaan kendaraan dinas. Sanksi penggunaan kendaran dinas yang dapat diterapkan antara lain:

1. Sanksi administrasi adalah berupa pencabutan izin pengguna kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna.
2. Sanksi perdata ialah berupa tuntutan ganti rugi kepada pengguna atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas
3. Sanksi pidana yaitu berupa pemidanaan pengguna kendaraan dinas yang mempergunakan kendraaan dinas untuk hal-hal yang dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang meggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau kepentingan diluar fungsi jabatan dan kedinasan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kerugian negara/ daerah. Pelanggaran seperti ini dapat dikenai sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditunjukkan kepada perbuatan, sedangkan sanksi pidana ditunjukkan kepada si pelaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 7 menyatakan bahwa pejabat daerah yang tidak menaati ketentuan atau melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin tersebut terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.⁵⁶

Dalam pertauran pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila pengguna barang yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhi kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, setiap pejabat yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran tersebut dengan teliti.⁵⁷

⁵⁶ Misi S. Salunga, *Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi Di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm 144

⁵⁷ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm 43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap kendaraan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya para pegawai dinas yang tidak mematuhi tertib penggunaan kendaraan dinas, apalagi sudah munculnya anggapan bahwa menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi merupakan hal yang bisa dimaklumi dan sudah biasa terjadi. Hal ini sama saja artinya bahwa mereka telah melupakan aturan yang mengatur tentang tertib penggunaan kendaraan dinas bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan operasional perkantoran dan tugas-tugas kedinasan saja.
2. Kendala yang dialami oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah kurangnya koordinasi antara pihak terkait, kinerja aparatur pada Dinas PU yang kurang baik dan rendahnya sumber daya aparatur di BPKAD.

B. Saran

Untuk terlaksananya pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap kendaraan Dinas Pekerjaan Umum (PU) berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana mestinya. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada BPKAD selaku pengawas inti aset daerah dapat melakukan koordinasi yang baik dengan tiap-tiap perangkat dinas Kabupaten Pelalawan khususnya pada dinas PU, agar dapat terjadinya pengawasan yang lebih maksimal dan untuk meningkatkan sistem pengawasan pada kendaraan dinas sebaiknya tidak hanya berupa evaluasi dan pembinaan saja tapi juga dilakukan pengusutan perkara sampai tuntas agar memberikan efek jera bagi para penyalahgunaan kendaraan dinas sehingga hal tersebut tidak lagi terjadi. Serta melakukan penambahan anggota yang memadai pada subbidang pengawasan agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih optimal.
2. Diharapkan kepada para aparatur Dinas PU untuk dapat meningkatkan Kembali kinerjanya dengan lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku khususnya terhadap tertib penggunaan kendaraan dinas agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi dan hanya menggunakannya untuk kepentingan yang bersifat kedinasan saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).
- Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Jakarta, penerbit intermedia, 1986) .
- Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014).
- Dr.Ni'matul Huda, *ilmu negara*, (Yogyakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2011).
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik ,Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung, Alfabetha, 2005) .
- Eryana, “*Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan*”, Jurnal Interpretasi Hukum, hlm 90.
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru, Anafah Publishing, 2011).
- <https://bpkad.pelalawankab.go.id/main>
- [https://kalsel.antaranews.com/berita/5410/kendaraan-dinas-harus-sesuai fungsi/diakses tanggal 13 April 2018.](https://kalsel.antaranews.com/berita/5410/kendaraan-dinas-harus-sesuai-fungsi/diakses%20tanggal%2013%20April%202018)
- <https://www.dpuprpelalawan.com/bidang/sekretariat>
- [https://www.kaskus.co.id/thread/51d26a3359cb17b432000000/penyalahgunaan-kendaraan-plat-dinas-negara/diakses tanggal 1 Juli 2018.](https://www.kaskus.co.id/thread/51d26a3359cb17b432000000/penyalahgunaan-kendaraan-plat-dinas-negara/diakses%20tanggal%201%20Juli%202018)
- [https://www.riau.go.id/home/content/21/kab-pelalawan.](https://www.riau.go.id/home/content/21/kab-pelalawan)
- Ida Ayu Widiati,“*Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Instansi Pemerintah*”, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol 1 Nomor 2 Tahun 2020.
- Jurnal Analisis, *Desember 2017*, Vol.6 No 2.
- Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Andi, 2017).
- Lia Daniati dan Lena Farida, *Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 1, Nomor 3, tahun 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah* (Malang, Setara Press, 2012).
- M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Ar-Ru Media, 2012).
- Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta, penerbit Cv Budi Utama, 2018)
- Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Misi S. Salunga, *Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi Di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.
- Moch.Ardi, "kajian hukum terhadap penggunaan kendaraan dinas diluar keperluan dinas ". *Jurnal UNIBA law review* . Vol 1 Tahun 2019
- Muchsan, S.H, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta, liberty, 1992).
- Nuzlan botutihe, "Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol 6 Nomor 2 Tahun 2018.
- Penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten pelalawan Nomor 3 tahun 2011 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 11.
- Peraturan Bupati Pelalawan, Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang *Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas*. Pasal 1 angka 5
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Pasal 1 huruf g.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 305.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 01 Tahun 2013 tentang *Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak*, Pasal 1 angka 3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang *Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri*. Pasal 1 angka 6.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Pasal 1 angka (1).

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta ,PT.RajaGrafindo Persada, 1984).

Said Muhammad Rizal,“*Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai*”. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* . Vol Tahun 2019.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta, UII Press, 1982).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2009).

Sri Wahyuni dan rifki khoirudin, *pengantar manajemen aset* ,(makassar, cv.nas media pustaka, 2020).

Sujamto,*Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta, ghalia Indonesia 1986).

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabet, 2014).

Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003).

W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Sinar Grafika Offset, 2018).

Zefrizal, UPTD Spam Air Minum dan Kepala Bidang Aset Kedinasan Badan Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Pelalawan , Wawancara, tanggal 6 Januari 2021.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN DINAS OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.” yang ditulis oleh :

Nama : **UMI FARIDHATUL DA'WA**
Nim : 11727200348
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah di munaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah-Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Zulkifli. M.Ag.

Sekretaris
Dr. Kasmidin, Lc., MA

Penguji I
Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II
Dr. H. Magfiroh, MA

Mengetahui:
Kassubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

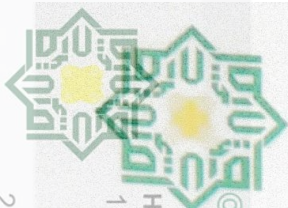
NIP.19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP 00.9/3327/2021

Pekanbaru, 06 April 2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	UMI FARIDHATUL DA'WA
NIM	11727200348
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Semester	VIII (Delapan)
Lokasi	Dinas BPKAD (badan pengelolaan keuangan dan aset daerah) dan Dinas pekerjaan umum kabupaten pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul :Pelaksanaan pengawasan kendaraan dinas oleh badan pengelolaan keuangan dan
aset daerah pada dinas pekerjaan umum berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan nomor 24
tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



n.n. Rektor
Pekanbaru

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN PAMONG PRAJA KAWASAN BHAKTI PRAJA NO. 05 TELP/FAX. (0761) 7050013
PANGKALAN KERINCI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 800/DPUPR/VII/2021/..193

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan menerangkan bahwa :

Nama : **UMI FARIDHATUL DA'WA**
NIM : 11727200348
Prodi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 02 Juli 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dengan judul : **"Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangkalan Kerinci, 02 Juli 2021

**An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PELALAWAN
SEKRETARIS**

Ub

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

M. REKKI KHUM, ST

Panata Tk. I (III/d)

NIP. 1973016 200604 1 018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 800 / BPKAD / 2021 / 300

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI, S.KM, M.Kes
 Jabatan : Kepala Bidang Aset

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : UMI FARIDHATUL DA'WA
 NIM : 11727200348
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Maksud : bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Riset pada Badan
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan
 terhitung sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan 28 Juni 2021

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkalan Kerinci, 28 Juni 2021
 17 Dzulqaedah 1442

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Sekretaris

u.b

KEPALA BIDANG ASET

SRI WAHYUNI, S.KM, M.Kes

Pembina

NIP. 19760203 200003 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/41033
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3327/2021 Tanggal 6 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

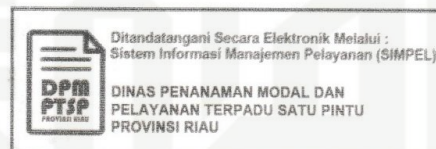
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | UMI FARIDHATUL DA'WA |
| 2. NIM / KTP | : | 11727200348 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN DINAS OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta miliknya UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMTSP/2021/0107

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41033 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

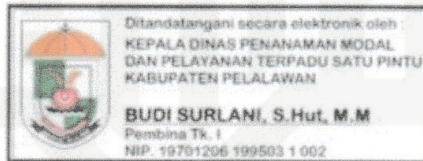
1. Nama : **UMI FARIDHATUL DA'WA**
2. NIM / KTP : 11727200348
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JL. PINANG GG. GAMBIR
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN DINAS OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
7. Lokasi Penelitian : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 21 Juni 2021

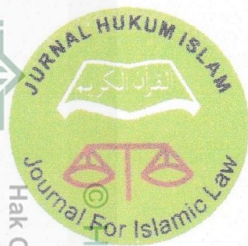


Tembusan :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : UMI FARIDHATUL DA'WA
NIM : 11727200348
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN DINAS OLEH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA
 DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN
 BUPATI PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK
 DAERAH

Pembimbing: Lysa Angrayni, SH., MH.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Umi Faridhatul Da'wa , dilahirkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 Februari 1999. Anak ke 3 ini merupakan putri dari pasangan Sajadi dan Ernidawati, saat ini penulis tinggal di pekanbaru ,Jalan Harapan Raya, Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 007 Pkl.kerinci tamat pada Tahun 2010/2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri Bernas Binsus Pkl.Kerinci tamat pada Tahun 2013/2014 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Keatas di SMA Negeri 1 Pkl. kerinci kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan dan Penulis tamat pada Tahun 2016/2017.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan Magang di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pekanbaru Setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Pada Tanggal 02 Desember 2021 Penulis dinyatakan lulus dengan judul Skripsi “PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN DINAS OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH”.